PEMERINTAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG

TAHUN
2026

RENJA 2026

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2026

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan,	Petugas Verifikator,
Ewiek Khavida, S.STP, MM	Arthati Dwi Hutami, S.E.
NIP. 19831118 200212 2 001	NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah disusun untuk menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan anggaran dalam sub kegiatan Tahun 2026, sebagai upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2026 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah, terutama apabila dilakukan review atas Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 31 Juli 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung

Ripto Susilo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH **9**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 39
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah 86
2.4. *Review* terhadap rancangan awal RKPD 87
2.5. Inovasi Perangkat Daerah 97
2.6. Penghargaan 97
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **99**
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 99
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah 99
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **105**
4.1. Program dan Kegiatan 105
BAB V PENUTUP **147**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah s.d Tahun 2024 10
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2025 22
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Temanggung 40
Tabel 2. 50 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2022-2024 97
Tabel 2. 51 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

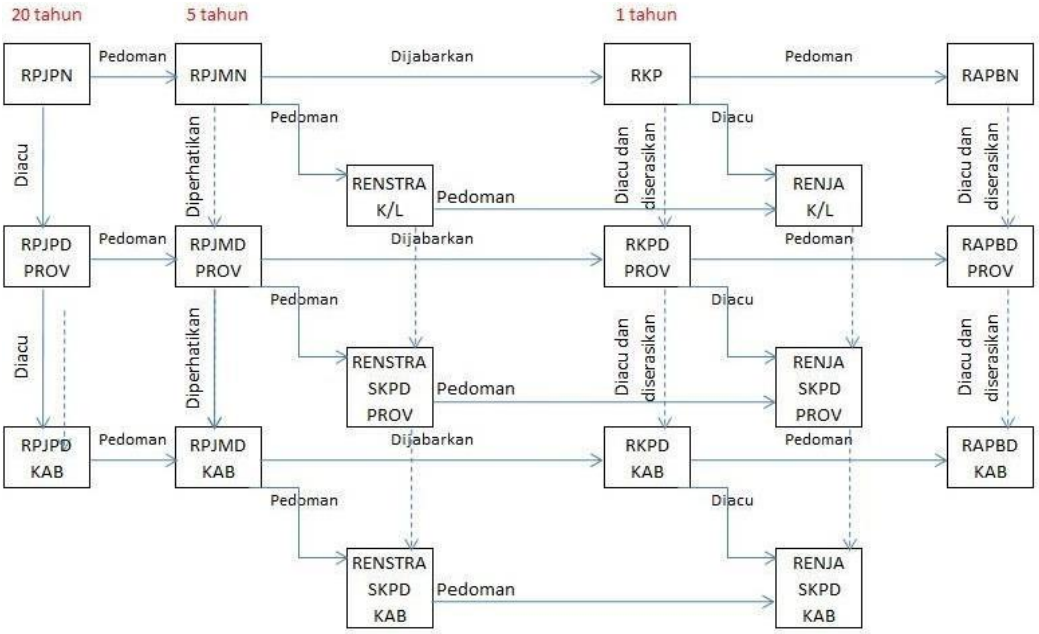
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Sekretariat Daerah, yang menyangkut aspek:

1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah;
2) Kondisi pelayanan Sekretariat Daerah;
3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah;
4) Data Pokok Pembangunan Sekretariat Daerah;
5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Sekretariat Daerah;
6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;dan
7) Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat Daerah.

b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah adalah:

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.

2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Sekretariat Daerah untuk kondisi tahun 2025-2029;
4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
5) Menghitung realisasi dan capaian kinerja realisasi Triwulan II tahun 2025;
6) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Sekretariat Daerah.

c. Me*review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu berdasarkan renstra Sekretariat Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

   Me*review* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Sekretariat Daerah;
3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Sekretariat Daerah;
4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa

yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's *(Sustainable Developmnet Goals)*;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Sekretariat Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

g. **Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

h. **Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pembangunan daerah.

i. **Penyajian awal dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah;**
Penyusunan dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. **Telaahan Kebijakan Nasional;**
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. **Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah;**
Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. **Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**
Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. **Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**
Dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
s.d Tahun 2024

1. Bagian Pemerintahan

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	16	17	18	19
A	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Kerja Sama yang diimplementasikan	%	**100**			50	-	50,00	-
		Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	**100**			50		50,00	
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	**100**			200		200,00	
B	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**		**42**	**474.971.100**	**979.297.000**	**42**	**957.772.208**	**100,00**	**97,80**
	Administrasi Tata Pemerintahan			**30**	**426.471.000**	**953.895.100**	**30**	**933.154.508**	**100,00**	**97,83**
1	Penataan Administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	12	25.234.000	11.755.400	12	8.427.000	100,00	71,69
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	12	29.766.000	12.139.700	12	446.303.710	100,00	3676,40
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	6	371.471.000	930.000.000	6	911.361.758	100,00	98,00
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			**12**	**48.500.100**	**25.401.900**	**12**	**24.617.700**	**100,00**	**96,91**
	Fasiilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	12	48.500.100	25.401.900	12	24.617.700	100,00	96,91

2. Bagian Kesra dan Bina Mental

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	9	10	11	20	21	22	23
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik.	%	85			84,00		99	0,00
		Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	60			50,00		83	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan	4	2.888.300.000	26.583.750.100				
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kegiatan	2	1.250.000.000	675.000.100	2,00	604.911.569	100,00	89,62
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	kegiatan	1	388.300.000	24.733.977.600	1,00	24.485.903.084	100,00	99,00
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	kegiatan	1	1.250.000.000	1.174.772.400	1,00	989.636.290	100,00	84

3. Bagian Hukum

No	Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
A	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		%		1.425.738.600	1.470.738.600	100	1.628.847.848	100	1.628.847.848
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									
		Persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi	%	100			100		100	
		Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi	%	100			100		100	
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum secara Non Litigasi	%	100			100		100	
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum secara Litigasi	%	100			100		100	
		Persentase Dokumentasi Perundangan melalui JDIH	%	100			23,08		23,08	
a	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang Difasilitasi	Dokumen	111	50.000.000	50.000.000	99	48.453.303	100	48.453.303
b	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi dan litigasi	Kasus	30	1.330.000.000	1.375.000.000	40	1.540.224.075	100	1.540.224.075
c	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Perundangan yang Didokumentasikan melalui JDIH	Dokumen	111	45.738.600	45.738.600	52	40.170.470	100	40.170.470

4. Bagian Pembangunan

Kode Rekening	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	16	17	18	19
A										
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	%	100			95,54		95,54	
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit kerja tepat waktu	%	100			89		88,84	
		Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	95			100,00		100,00	
		Presentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	%	100			75,00		75,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaporan Pembangunan yang tepat waktu	Laporan	12	250.000.000	124.000.000	12	0	100	0,00
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	85.000.000	50.000.000	1,00		100	0,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4	165.000.000	107.080.000	4		100	0,00

5. Bagian Perekonomian

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024 (%)	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	9	10	11	20	21	22	23
1	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah				905.398.022	905.398.022		506.407.335	100,00	
		Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100,00			100,00		100,00	
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100,00			100,00		100,00	
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33			100,00		100,00	
a	Koordinasi,Sinkronisasi Monitoring, dan Evalusai Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4	127.716.000	127.716.000	4	96.780.675	100	75,78
b	Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan,dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	5	719.966.022	719.966.022	5	648.677.760	100	90,10
c	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	57.716.000	57.716.000	2	53.444.350	100	92,60

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

KODE	BIDANG/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2024				REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7		16	17	18	19
4.01.03.2.03	Program Perekonomian dan Pembangunan				276.068.400	251.630.400	251.630.400		239.427.948		95,15
		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	100				97,70		97,70	
		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	%	100				100,00		100,00	
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	97				78,50		80,93	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Tahun 2024-2026)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	85	141.817.200	117.379.200	127.034.200	85	116.746.647	100	91,90
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Tahun 2024-2026)	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	46	120.612.200	120.612.200	120.612.200	46	119.252.301	100	98,87
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Tahun 2024-2026)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	103	13.639.000	13.639.000	3.984.000	103	3.429.000	100	86,07

7. Bagian Umum

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi 2024		Capaian 2024	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	16	17	18	19
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah		100	33.853.042.001	33.922.390.562	100	32.463.840.472	100,00	98,57
				1.680	14.498.459.973	13.728.746.162	1.677	13.531.914.353	100,00	98,57
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.666	14.328.710.810	13.700.662.841	1.666	13.531.914.353	100,00	98,77
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	1666	14.328.710.810	13.700.662.841	1.666	13.531.914.353	100,00	98,77
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			14	169.749.163	28.083.321	14	-	100,00	0,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	org/bln	14	169.749.163	28.083.321	14	-	100,00	0,00
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah		597	19.354.582.028	20.193.644.400	597	18.931.926.119	100,00	93,75
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			51	340.000.000	340.000.000	51	174.685.000	100,00	51,38
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	50	300.000.000	300.000.000	50	174.685.000	100,00	58,23

	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	2	40.000.000	40.000.000	1	-	100,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				99.997.000	-	0	-	0,00	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	99.997.000	-	0	-	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			300	2.077.997.500	3.277.997.500	300	3.203.563.080	100,00	97,73
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	100.000.000	100.000.000	12	91.182.036	100,00	91,18
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	126.900.000	126.900.000	12	122.386.090	100,00	96,44
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	120.000.000	120.000.000	12	117.306.872	100,00	97,76
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	200.000.000	200.000.000	12	199.102.850	100,00	99,55
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	228	50.000.000	50.000.000	228	31.264.500	100,00	62,53
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	1.000.000.000	2.200.000.000	12	2.182.219.000	100,00	99,19
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	481.097.500	481.097.500	12	460.101.732	100,00	95,64
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			41	7.499.883.028	7.014.903.900	41	6.788.596.600	100,00	96,77

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	11	6.799.998.928	6.373.512.400	11	6.219.059.000	100,00	97,58
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	499.999.500	499.999.500	1	439.082.000	100,00	87,82
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	0	99.992.600		0	-	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	29	99.892.000	141.392.000	29	130.455.600	100,00	92,27
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36	5.896.394.000	5.896.394.000	36	5.407.943.086	100,00	91,72
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	15.000.000	15.000.000	12	13.076.000	100,00	87,17
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	1.098.400.000	1.098.400.000	12	942.782.887	100,00	85,83
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	4.782.994.000	4.782.994.000	12	4.452.084.199	100,00	93,08
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145	1.804.457.600	2.214.349.000	145	2.002.929.523	100,00	90,45
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	28	249.999.000	249.999.000	28	245.542.029	100,00	98,22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	20	749.994.000	749.994.000	20	708.051.052	100,00	94,41

	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	12	84.928.000	84.820.000	12	79.310.000	100,00	93,50
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	12	99.645.000	99.645.000	12	72.073.240	100,00	72,33
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	1	19.900.000	19.900.000	1	19.210.000	100,00	96,53
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	72	599.991.600	1.009.991.000	72	878.743.202	100,00	87,01
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			24	1.635.852.900	1.450.000.000	24	1.354.208.830	100,00	93,39
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	paket	12	353.852.900	300.000.000	12	300.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga WakilKepala Daerah yang Disediakan	paket	0	282.000.000		0	-	0,00	0,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	12	1.000.000.000	1.150.000.000	12	1.054.208.830	100,00	91,67

8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Renja	DPA	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	7	8	9	18	19	20	21
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani	%	100			100		100	
1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
c	Penyediaan Dana Penunjang Opersional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	192	600.000.000	600.000.000	192	509.820.000	100	84,97
2	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
a	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Laporan	500	833.864.000	676.239.853	954	659.479.312	100	97,52
b	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	2000	1.300.000.000	1.413.251.000	2367	1.378.802.033	118	97,56
c	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	800	600.864.000	334.999.853	1094	272.638.151	100	81,38

9. Bagian Organisasi

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	9	10	11	20	21	22	23
4.01.01	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Presentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	17,39	341.000.000	210.000.000	0,00	201.000.452	100,00	95,71
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi									
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah dokumen kelembagaan dan analisis jabatan	Dokumen	2	100.000.000	50.000.000	2,00	48.730.949	100	97,46
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	100.000.000	50.000.000	2,00	49.814.000	100	99,63
4.01.01.2.13.03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	50.000.000	35.000.000	2,00	34.953.003	100	99,87
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kineja Pemerintah Daerah	Dokumen	2	91.000.000	75.000.000	2,00	67.502.500	100	90,00

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
s.d Triwulan II Tahun 2025

BAGIAN PEMERINTAHAN

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi 2025		Capaian 2025	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	16	17	18	19
A	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Kerja Sama yang diimplementasikan	%	**100**			25	-	25,00	-
		Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	**100**			25		25,00	
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	**100**			100		100,00	
B	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**		**42**	**374.472.750**	**313.134.750**	**3**	**151.466.705**	**7,14**	**48,37**
	Administrasi Tata Pemerintahan			**30**	**338.178.750**	**297.634.750**	**0**	**151.016.705**	**0,00**	**50,74**
1	Penataan Administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	12	24.864.000,00	13.000.000	2	-	16,67	0,00
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	12	15.000.000,00	12.500.000	3	9.025.500	25,00	72,20
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	6	298.314.750,00	272.134.750	3	141.991.205	50,00	52,18
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			**12**	**36.294.000**	**15.500.000**	**3**	450.000	**25,00**	**2,90**
	Fasiilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	12	36.294.000,00	15.500.000	3	450.000	25,00	2,90

BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi 2024		Capaian 2024	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	9	10	11	20	21	22	23
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik.	%	88			87,84		99	0,00
		Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	60			40,00		67	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan	4	1.952.556.975	25.634.489.600				
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kegiatan	2	263.579.375	250.000.000	0,75	99.471.200	37,50	39,79
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	kegiatan	1	588.977.600	24.484.489.600	0,25	27.972.498	25,00	0,11
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan	kegiatan	1	1.100.000.000	900.000.000	0,80	855.861.397	80,00	95

		Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								
	Jumlah				**1.952.556.975**	**25.634.489.600**	**2**	**983.305.095**		

BAGIAN HUKUM

No	Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi 2025		Capaian 2025	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
A	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		%		1.109.488.600	1.242.074.800	100	183.327.841	100	183.327.841
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									
		Persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi	%	100			100		100	
		Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi	%	100			100		100	
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum secara Non Litigasi	%	100			100		100	
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum secara Litigasi	%	100			100		100	
		Persentase Dokumentasi Perundangan melalui JDIH	%	100			23,08		23,08	
a	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang Difasilitasi	Dokumen	111	50.000.000	50.000.000	87	3.671.500	100	3.671.500
b	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi dan litigasi	Kasus	30	1.013.750.000	1.156.000.000	7	164.609.797	100	164.609.797
c	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Perundangan yang Didokumentasikan melalui JDIH	Dokumen	111	45.738.600	36.074.800	21	15.046.544	100	15.046.544

BAGIAN PEREKONOMIAN

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi 2025		Capaian 2025 (%)	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	9	10	11	20	21	22	23
1	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah				896.003.000	684.716.000		168.335.100	38,33	
		Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100,00			22,25		22,25	
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100,00			100,00		100,00	
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33			83,33		100,00	
a	Koordinasi,Sinkronisasi Monitoring, dan Evalusai Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4	107.716.000	77.716.000	1	38.289.650	25	49,27
b	Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan,dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	5	750.000.000	587.000.000	2	122.234.950	40	20,82
c	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	38.287.000	20.000.000	1	7.810.500	50	39,05

BAGIAN PEMBANGUNAN

Kode Rekening	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi 2025		Capaian 2025	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	16	17	18	19
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100			14,11		14,11	
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit kerja tepat waktu	%	100			100,00		100,00	
		Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	95			100,00		100,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaporan Pembangunan yang tepat waktu	Laporan	12	123.810.000	87.285.720	6	21.682.671	50	24,84
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	45.000.000	8.870.000	0,50	1.471.676	50	16,59
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4	78.810.000	78.415.720	2	20.210.995	50	25,77

BAGIAN PBJ

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
				K	Rp(Renja)	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	16	17	18	19
					135.522.800	116.477.400		42.555.451		36,54
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	%	40			95,39		100	
4.01.03.2.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan	%	100			57,15		57,15	
		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement yang berhasil dilaksanakan	%	100			52,61		52,61	
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	30			13,02		43,38	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Tahun 2024-2026)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	25	48.000.000	50.240.800	17	24.809.098	68	49,38
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Tahun 2024-2026)	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	2954	87.522.800	66.236.600	1555	17.746.353	52,64	26,79
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Tahun 2024-2026)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	103	0	0	50	0	48,54	#DIV/0!

BAGIAN UMUM

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2025			Realisasi 2025		Capaian 2025	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	16	17	18	19
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**31.437.548.595**	**28.220.337.693**		**11.279.045.542**	**0,00**	**0,00**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah**		**100**	**14.426.418.421**	**15.346.051.989**	**100**	**7.450.335.564**	**57,22**	**48,55**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Bupati dan Wakil Bupati			**1.898**	**14.426.418.421**	**15.346.051.989**	**1.086**	**7.450.335.564**	**57,22**	**48,55**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**1.876**	**14.256.755.678**	**15.172.147.677**	**1.072**	**7.388.139.438**	**57,14**	**48,70**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	1876	14.256.755.678	15.172.147.677	1.072	7.388.139.438	57,14	48,70
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			**22**	**169.662.743**	**173.904.312**	**14**	**62.196.126**	**63,64**	**35,76**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	org/bln	22	169.662.743	173.904.312	14	62.196.126	63,64	35,76
B	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah**		**587**	**17.011.130.174**	**12.874.285.704**	**265**	**3.828.709.978**	**45,14**	**29,74**
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			**52**	**339.966.000**	**339.966.000**	**35**	**12.008.000**	**67,31**	**3,53**

	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	50	299.966.000	299.966.000	35	10.940.000	70,00	3,65
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	2	40.000.000	40.000.000	0	1.068.000	0,00	2,67
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**-**	**-**	**0**	-	0,00	**0,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	-	-	0	-	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**288**	**2.069.999.500**	**1.722.444.550**	**144**	**947.411.422**	**50,00**	**55,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	100.000.000	70.120.000	6	1.765.000	50,00	2,52
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	120.000.000	111.500.000	6	-	50,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	320.000.000	226.044.800	6	85.990.000	50,00	38,04
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	-	-	0	-	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	228	50.000.000	50.000.000	114	13.575.000	50,00	27,15
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	1.000.000.000	1.000.000.000	6	694.065.000	50,00	69,41
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	laporan	12	479.999.500	264.779.750	6	152.016.422	50,00	57,41

		Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**30**	**5.355.939.999**	**1.651.568.199**	**10**	**51.000.000**	**33,33**	**3,09**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	6	4.905.939.999	1.402.239.999	0	-	0,00	0,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	-	0	-	0,00	0,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	4	200.000.000	44.400.000	0	-	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	20	250.000.000	204.928.200	10	51.000.000	50,00	24,89
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**36**	**5.547.897.000**	**5.547.897.000**	**18**	**1.845.951.901**	**50,00**	**33,27**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	15.000.000	15.000.000	6	3.070.000	50,00	20,47
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	1.098.400.000	1.098.400.000	6	456.793.252	50,00	41,59
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	4.434.497.000	4.434.497.000	6	1.386.088.649	50,00	31,26
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**145**	**1.799.788.000**	**1.722.470.280**	**46**	**453.620.895**	**31,72**	**26,34**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	28	250.000.000	231.397.500	12	124.207.330	42,86	53,68

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	20	750.000.000	691.678.000	10	239.191.725	50,00	34,58
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	12	79.888.000	79.888.000	6	-	50,00	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	12	100.000.000	99.606.780	6	13.105.000	50,00	13,16
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	1	19.900.000	19.900.000	0	-	0,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	72	600.000.000	600.000.000	12	77.116.840	0,00	12,85
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			**36**	**1.897.539.675**	**1.889.939.675**	**12**	**518.717.760**	**33,33**	**27,45**
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	paket	12	300.000.000	300.000.000	6	124.495.000	0,00	41,50
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga WakilKepala Daerah yang Disediakan	paket	12	282.000.000	282.000.000	0	-	0,00	0,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	12	1.315.539.675	1.307.939.675	6	324.322.760	50,00	24,80

BAGIAN ORGANISASI

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	9	10	11	20	21	22	23
4.01.01	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Presentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	23,90	78.250.000	78.250.000	30,43	22.932.498	100,00	29,31
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi									
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	4	22.000.000	22.000.000	2,00	5.434.351	50	24,70
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	56.250.000	56.250.000	2,00	17.498.147	100	31,11

BAGIAN PROKOMPIM

NO	BIDANG/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
				K	Renja	DPA	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	7	8	9	18	19	20	21
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani**	%	100			100		100	
1	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**									
c	Penyediaan Dana Penunjang Opersional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	192	600.000.000	600.000.000	211	291.900.000	110	48,65
2	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**									
a	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Laporan	500	497.343.700	436.864.200	557	79.316.717	111	18,16
b	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	2000	1.154.250.000	775.361.000	1330	478.170.362	67	61,67
c	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	800	248.671.600	334.999.853	572	68.413.112	72	20,42

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
   1) Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi
   2) Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah
   3) Nilai penyelenggaraan pelayanan publik
   4) Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
   1) Persentase Kerjasama yang diimplementasikan
   2) Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu
   3) Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu
   4) Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik
   5) Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi
   6) Persentase produk hukum yang difasilitasi
   7) Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi
   8) Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi
   9) Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
   10) Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan
   11) Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
   12) Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)

13) Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)
14) Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah
15) Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah
16) Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB

3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
   1) Penataan Administrasi pemerintahan
   2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
   3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
   4) Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
   5) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
   6) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
   7) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
   8) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
   9) Fasilitasi Bantuan Hukum
   10) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
   11) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
   12) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
   13) Koordinasi,Sinkronisasi Monitoring, dan Evalusai Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
   14) Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
   15) Pengendalian dan distribusi perekonomian
   16) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   17) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
   18) Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
   19) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   20) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   21) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   22) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

23) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
24) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
26) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
28) Fasilitasi Kunjungan Tamu
29) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
33) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
34) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
36) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
38) Pemeliharaan Mebel
39) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
41) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
42) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
43) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
44) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
45) Fasilitasi Keprotokolan
46) Pendokumentasian Tugas Pimpinan
47) Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan
48) Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
49) Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
50) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

4. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
   1) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
   2) Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum
   3) Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual
5. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
   1) Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Selesai Tepat Waktu
   2) Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu
   3) Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah
   4) Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
6. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
   1) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ***Sangat Tinggi*** yaitu dengan nilai **99,02%.** Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
   Capaian Kinerja : 99,83 % kategori Sangat Tinggi
2. Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum
   Capaian Kinerja : 93,31% kategori Sangat Tinggi
3. Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual
   Capaian Kinerja : 93,31 % kategori Sangat Tinggi

4. Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi
   Capaian Kinerja : 100 % kategori Sangat Tinggi
5. Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah
   Capaian Kinerja : 100 % kategori Sangat Tinggi
6. Nilai penyelenggaraan pelayanan publik
   Capaian Kinerja : 100 % kategori Sangat Tinggi
7. Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan
   Capaian Kinerja : 100 % kategori Sangat Tinggi

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

1.1.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2. 3

Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Temanggung

Bagian Pemerintahan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II Tahun 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja Tahun 2025
					2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR				
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																			
	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																			
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Angka	3,434 (Tinggi)	3,44	3,45	3,46	3,434	3,298		95,60	v					Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja	Terjaga sinergitas yang baik antara Bagian Pemerintahan selaku sekretariat IKK LPPD dengan OPD pengampu	a. Beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum bisa tercapai 100% karena terdapat kendala internal pada OPD pengampu IKK. b. OPD belum mampu secara maksimal memenuhi kriteria dan ketentuan yang terdapat dalam pedoman penyusunan LPPD	Melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK), melaksanakan koordinasi dengan Kemendagri serta provinsi terkait dengan penyelarasan rumus Indikator Kinerja Kunci (IKK)
	INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100		100	v					Jumlah Kerja Sama yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan dibagi jumlah kerja sama yang dilakukan dikali 100%	Mendukung pelaksanaan program KKN di Kabupaten temanggung b. mendukung akreditasi perguruan tinggi	Kurang optimalnya koordinasi internal Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)	Mengoptimalkan koordinasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
			Jumlah Kerja Sama yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan					*67*	*24*											
			jumlah kerja sama yang dilakukan					*67*	*24*											

		Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100		100	v					Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM	a. Koordinasi dan komunikasi aktif dengan OPD pengampu SPM b. Adanya monitoring yang dilaksanakan secara berkala tiap triwulan oleh Kemendagri dan juga pemerintah provinsi	Sering terjadi perubahan mutu layanan SPM sehingga sulit dipedomani secara pasti dan sulit untuk sinkron dengan Renaksi SPM Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
			Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu					*7*	*7*										
			jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM					*7*	*7*										
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	n.a	100	100	100	100	100		100	v					Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%	a. Terjaganya sinergitas yang baik dengan OPD pengampu indikator LPPD dan LKPJ b. Perbaikan metode pengumpulan data	kendala internal OPD dalam memenuhi beberapa indikator dalam LPPD dan LKPJ	a. Optimalisasi penyelesaian permasalahan dan ketepatan waktu pengumpulan data LPPD dan LKPJ pada tenggat waktu yang telah ditentukan b. Koordinasi aktif dengan OPD Pengampu LPPD dan LKPJ
			Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu					*26*	26										
			Jumlah Perangkat Daerah					*26*	26										
JUMLAH INDIKATOR IKUPD			**1**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD PERANGKAT DAERAH**							**95,60**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**			
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH**							**100**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**			
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PD			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN PD**							**97,80**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**			

Bagian Kesra dan Bina Mental

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II Tahun 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja Tahun 2025
					2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR				
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																			
	INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	%	100	85	88	89	87,84	87,84		99,82	v					Jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras keagamaan	Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Adanya perubahan kebijakan	Meningkatkan jumlah rumah ibadah dan sarapras kegamaan kondisi baik
				Jumlah rumah ibadah dan sarpras keagamaan kondisi baik				*5310*	5310											
				Jumlah rumah ibadah dan sarpras keagamaan				*6045*	6045											
		Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	na	60	60	60	80	60		100,00	v					Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan keagamaan	Sudah terjadwalnya kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan	Adanya perubahan kebijakan	Melaksanakan peringatan kegiatan keagamaan
				Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi				*4*	3											
				Jumlah kegiatan kegamaan				*5*	5											
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH**							99,91	2	0	0	0	0				
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PD			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN PD**							99,91	2	0	0	0	0				

Bagian Hukum

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW I Tahun 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja Tahun 2025
					2024	2025	2026	2024	2025		ST	T	S	R	SR				
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																		
	INDIKATOR PROGRAM																		
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	na	85	86	86	100	100	100	v					Jumlah produk hukum yang difasilitasi dibagi jumlah produk hukum yang diajukan dikali 100%	Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan	Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan produk hukum daerah	Terlaksananya propemperda dan propemperkada sesuai waktu pelaksanaan yang telah disusun
			Jumlah produk hukum yang difasilitasi					99	*51*										
			Jumlah produk hukum yang diajukan					99	51										
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	*%*	*100*	100	100	100	73,24	58,0645161	58,06				v		Jumlah perundangan yang didokumentasikan melalui JDIH dibagi jumlah perundangan yang dibuat dikali 100%	Komitmen yang tinggi dari pegawai dan monitoring dari pimpinan	Lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari sarpras yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal	Optimalisasi pendokumentasian produk hukum daerah ke JDIH sesuai dengan jumlah produk hukum yang ditetapkan pada tahun berjalan
			Jumlah perundangan yang didokumentasikan melalui JDIH					52	18										
			Jumlah perundangan yang dibuat					71	31										
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	*%*	*100*	100	100	100	100	100	100	v					Jumlah permasalahan hukum yang terselesaikan secara non litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi dikali 100%	Terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, OPD terkait, dan anggota Forkompida Kab. Temanggung sehingga mempermudah pelaksanaan mediasi dan	Kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum	Optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi di Kabupaten Temanggung

																pencarian jalan keluar		
			Jumlah permasalahan hukum yang terselesaikan secara non litigasi					36	*5*									
			Jumlah permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi					36	5									
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	*%*	*100*	100	100	100	100	1	1					v	Jumlah permasalahan hukum yang terselesaikan secara litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara litigasi dikali 100%	Integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum, optimalnya penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan/non litigasi (semakin banyak penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan, maka meminimalisasi penyelesaian permasalahan secara litigasi)	Kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum	Optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi di Kabupaten Temanggung
			Jumlah permasalahan hukum yang terselesaikan secara litigasi					4	*2*									
			Jumlah permasalahan hukum yang masuk secara litigasi					4	0									
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH**					**64,77**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**				
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PD			**4**	**RATA-RATA CAPAIAN PD**					**64,77**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**				

Bagian Perekonomian

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja Tahun 2025
					2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR				
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																			
	INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	93,9	50		50					V	(Jumlah realisasi ketersediaan barang bersubsidi/Jumlah kebutuhan barang bersubsidi) x 100%	Ketersediaan barang bersubsidi untuk mencukupi kebutuhan barang bersubsidi	Agen/Pangkalan BBM dan LPG tidak melaporkan stok	a. Memastikan Kab. Temanggung mendapatkan kuota barang bersubsidi pada awal tahun. b. Memberikan sosialisasi dan monitoring secara berkala kepada agen/pangkalan LPG dan BBM.
			Jumlah realisasi ketersediaan barang bersubsidi					4	2											
			Jumlah kebutuhan barang bersubsidi					4	4											
		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100		100	V					(Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan/Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi) x 100%	Permasalahan aduan barang bersubsidi yang dapat terselesaikan dengan koordinasi	Aduan tidak disampaikan secara tertulis dan tidak disertai bukti dukung	Menghimbau agar aduan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen/ bukti pendukung
			Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan					1	1											
			Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi					1	1											

		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33		100	V					(Jumlah BUMD dengan opini WTP/Jumlah BUMD) x 100%	Pembinaan dan Evaluasi BUMD yang dilaksanakan secara rutin	Pemeriksaan KAP atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilaksanakan pada awal tahun berikutnya, sehingga pada saat pelaporan triwulanan belum dapat diketahui gambaran opini laporan keuangan BUMD	Melakukan pembinaan dan koordinasi secara intensif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama dengan Tim Pembina dan Dewan Pengawas
			Jumlah BUMD dengan opini WTP					5	5										
			Jumlah BUMD					6	6										
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH**							83,33	2	0	0	0	1			
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PD			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN PD**							83,33	3	1	1	1	1			

Bagian Pembangunan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II Tahun 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja Tahun 2025
					2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR				
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																			
	INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	99,81	100	100	100	100	14,11		14,11				v		Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan dibagi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan dikali 100%	Dokumen kontrak menjadi syarat pencairan	1. Efisiensi anggaran menyebabkan pekerjaan yang sudah dilelang tidak dilanjutkan kontraknya; 2. Triwulan 1 sebagian besar pekerjaan belum dimulai.	1. Koordinasi internal dan eksternal 2. Penetapan target yang realistis 3. Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan 4. Monitoring paket pekerjaan fisik 5. Perencanaan diusahakan N-1 dan Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan juga pembinaan terhadap konsultan pengawas.
			Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan					404	57											
			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan					404	404											
		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100		100,00	v					Jumlah PD (unit kerja) yang menyampaikan laporan tepat waktu dibagi Jumlah PD	1. Karena menjadi salah satu syarat dan kelengkapan pencairan GU	1. Kurang tertibnya admin dalam input data ke laporan setiap bulan 2.	1. Tertib pelaporan 2. Evaluasi pelaporan 3. Admin baru segera menyesuaikan

																	(unit kerja) dikali 100%	2. Tertib pelaporan administrasi dan keuangan	Ketidaksesuain data	4. Koordinasi dengan PD terkait
			Jumlah PD/unit kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu					103	103											
			Jumlah PD/unit kerja					103	103											
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	97,76	100		100,00	v					Realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dibagi target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah dikali 100%	1. APBD ditetapkan tepat waktu 2. Kesiapan Tim Pelaksana	1. PD terlambat input dan yang diinput bukan data terbaru	1. Tertib pelaporan 2. Evaluasi pelaporan 3. Admin baru segera menyesuaikan 4. Koordinasi dengan PD terkait
			Realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah					88,84	48,06											
			Target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah					90,88	46,67											
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH**							**71,37**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**				
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PD			**3**	**RATA-RATA CAPAIAN PD**							**71,37**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**				

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2024	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaian S.D Tw Ii 2025	Status Capaian					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja Tahun 2025
					2025	2026	2027	2025	2026	2027		ST	T	S	R	SR				
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	13	14	15	16	17	*16*	*17*	*18*	*19*
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																				
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																				
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	%	n.a	40	50	60	95,39			95,39	V					Jumlah Paket Kontrak PDN Penyedia dibagi Jumlah Paket RUP PDN Penyedia dikali 100	Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025	Kinerja OPD belum mencatatkan kontrak PDN Penyedia	Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
			Jumlah Paket Kontrak PDN Penyedia					5994			5994									
			Jumlah Paket RUP PDN Penyedia					6284			6284									
INDIKATOR PROGRAM																				
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan	%	n.a	100	100	100	57,15			57,15				V		Total nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada SIRUP dibagi Total nilai pagu anggaran APBD pengadaan barang/jasa dikali 100	Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025	- Kinerja OPD belum memenuhi dateline pengajuan Berita Acara Verifikasi Rencana Umum Pengadaan - Persiapan perencanaan dari Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan	Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
			Total nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada SIRUP (Milyard)					242.578.707.321			242.578.707.321									
			Total nilai pagu anggaran APBD pengadaan barang/jasa (Milyard)					424.491.100.647			424.491.100.647									

		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement yang berhasil dilaksanakan	%	n.a	100	100	100	52,61			52,61				V		Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement yang berhasil dilaksanakan dibagi Jumlah keselurahan paket pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement yang ada di SIRUP dikali 100	Terbitnya Perpres No. 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kinerja OPD belum memaksimalkan pengadaan secara e-Procurement	Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
			Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement yang berhasil dilaksanakan					1541			1541									
			Jumlah keselurahan paket pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement yang ada di SIRUP					2929			2929									
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	n.a	30	20	10	13,02			13,02					V	Jumlah paket pengadaan barang/jasa non e-Procurment yang sudah dicatatkan pada SPSE dibagi Jumlah keseluruhan paket pengadaan barang/jasa barang/jasa bernilai paling banyak 100 juta yang ada di SIRUP	Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025	Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta	Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
			Jumlah paket pengadaan barang/jasa non e-Procurment yang sudah dicatatkan pada SPSE					404			404									
			Jumlah keseluruhan paket pengadaan barang/jasa bernilai paling banyak 100 juta yang ada di SIRUP					3.104			3104									
	JUMLAH INDIKATOR IKUPD		1	RATA RATA CAPAIAN IKUPD PERANGKAT DAERAH							95,39	1	0	0	0	0				
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		4	RATA RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH							40,92	0	0	0	2	1				
	JUMLAH TOTAL INDIKATOR PD		**5**	**RATA RATA CAPAIAN PD**							**68,15**	1	0	0	2	1				

Bagian Organisasi

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II Tahun 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja Tahun 2025
					2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR				
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																			
	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PEMDA																			
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	69,05	B>60-70	B>60-70	B>60-70	86,13	*86,13		100	ST					Jumlah angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen RB General dan RB Tematik hasil evaluasi dari KemenPANRB	Adanya Sistem Penilaian baru (RB General dan RB Tematik) yang memungkinkan adanya indikator baru yang berdampak pada masyarakat (seperti kemiskinan)	RB belum terinternalisasi dengan baik dan menyeluruh di seluruh tataran unit kerja dan individu pegawai	Melakukan evaluasi setiap triwulan sebelum adanya evaluasi dari KemenPANRB
	INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMDA																			
1	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif , bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Level / Nilai	65,17	B>60-70	B>60-70	B>60-70	66,36	*66,36		100	ST					Penggabungan nilai dari 4 indikator yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) hasil evaluasi dari KemenPANRB	Adanya tindaklanjut yang telah dilakukan dari evaluasi tahun sebelumnya	Belum ada reward dan/atau punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal	Menerapkan kebijakan reward dan/atau punishment yang telah disusun
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	84,97	B/76,61 – 88,30	B/76, 61 – 88,30	B/76, 61 – 88,30	86,91	*86,91		100	ST					Nilai rata-rata dari hasil survey kepuasan masyarakat di perangkat daerah/unit kerja penyelenggara pelayanan publik	Perbaikan pelayanan dari hasil survei sebelumnya, mempermudah akses pelayanan, pemanfatan teknologi informasi	SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana yang belum semuanya baik	Bimbingan teknis pelayanan prima bagi petugas layanan
	INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB	%	26,09	17,39	23,9	32,6	30,43	84,78		100	ST					Jumlah PD yang hasil evaluasi SAKIP ber predikat BB dibagi Jumlah PD	laporan kinerja yang secara umum telah memenuhi standar, menggambarkan	pada saat evaluasi dilaksanakan, implementasi SAKIP masih menggunakan	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi

																	kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Renstra tahun 2024-2026 sehingga tindaklanjut atas hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya belum seluruhnya dapat dilaksanakan	AKIP dari APIP Pemda
					Jumlah PD yang hasil evaluasi SAKIP ber predikat BB	14	39												
					Jumlah seluruh PD	46	46												
JML INDIKATOR TUJUAN PEMDA	**1**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMDA**						100	1	0	0	0	0						
JML INDIKATOR SASARAN PEMDA	**2**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN PEMDA**						100	2	0	0	0	0						
JUMLAH INDIKATOR IKUPD	**0**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD PERANGKAT DAERAH**						0	0	0	0	0	0						
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	**1**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH**						100	1	0	0	0	0						
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PD	**4**	**RATA-RATA CAPAIAN PD**						100	4	0	0	0	0						

Bagian Umum

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW II Tahun 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja Tahun 2025
					2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR				
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																			
	INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	71,43		71						Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi dibagi jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dikali 100 %	Target untuk mengirimkan dokumen perencanaan, laporan keuangan,laporan kinerja, penilaian terhadap tertib administrasi umum dan terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah secara benar dan tepat waktu antara lain Laporan Keuangan Januari, Februari, Maret 2025, CALK 2024, Dokumen LKJIP 2024, PK 2025, Rencana aksi dan SKP	- Adanya perubahan kebijakan maupun kebijakan baru yang belum dapat diterapkan secara maksimal - aplikasi yang sering maintenance	meningkatkan koordinasi dan kemampuan SDM, Koordinasi antar bagian yang dilaksanakan secara rutin dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait secara intensif
			Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi					14	20											
			Jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang pada Triwulan berjalan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung					14	28					S						
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100		100	ST					Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang seharusnya terpenuhi dikali 100%	Adanya sarana prasarana kedinasan Kepala Daerah yang harus dipenuhi	- Adanya perubahan kebutuhan sarana prasarana kedinasan yang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya dan adanya efisiensi anggaran - Adanya perubahan peraturan pengadaan barang/jasa	- Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan dan OPD terkait serta melaksanakan perubahan anggaran - Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku dan koordinasi dengan Bagian PBJ
			Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi					423	265											
			Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang seharusnya terpenuhi					423	265											
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH**							**86**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**				
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PD			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN PD**							**86**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**				

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2025	Status Capaian					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja Tahun 2025
					2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR				
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																			
	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																			
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi									
	INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100		100	T						terpenuhinya SDM bagian prokompim	Banyaknya kegiatan pimpinan, adanya kegiatan yang harus dilaksanakan diluar Agenda pimpinan, perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak.	mengkomunikasikan kegiatan pimpinan yang akan dilaksanakan dengan skala prioritas
			Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang seharusnya dilayani					2.367	1330											
			Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang Terlayani					2.367	1330											
JUMLAH INDIKATOR IKUPD			**1**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD PERANGKAT DAERAH**																
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**1**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH**																
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PD			**2**	**RATA-RATA CAPAIAN PD**																

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status Sangat Tinggi ada 22 terdiri dari:
    a. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
        1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Terjaga sinergitas yang baik antara Bagian Pemerintahan selaku sekretariat IKK LPPD dengan OPD pengampu
        2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum bisa tercapai 100% karena terdapat kendala internal pada OPD pengampu IKK. OPD belum mampu secara maksimal memenuhi kriteria dan ketentuan yang terdapat dalam pedoman penyusunan LPPD.
        3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK), melaksanakan koordinasi dengan Kemendagri serta provinsi terkait dengan penyelarasan rumus Indikator Kinerja Kunci (IKK)
    b. Persentase Kerjasama yang diimplementasikan
        1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Mendukung pelaksanaan program KKN di Kabupaten temanggung dan mendukung akreditasi perguruan tinggi
        2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang optimalnya koordinasi internal Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
        3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengoptimalkan koordinasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
    c. Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu
        1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Koordinasi dan komunikasi aktif dengan OPD pengampu SPM. Adanya monitoring yang dilaksanakan secara berkala tiap triwulan oleh Kemendagri dan juga pemerintah provinsi
        2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sering terjadi perubahan mutu layanan SPM sehingga sulit dipedomani secara pasti dan sulit untuk sinkron

dengan Renaksi SPM Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

d. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Terjaganya sinergitas yang baik dengan OPD pengampu indikator LPPD dan LKPJ. Perbaikan metode pengumpulan data
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kendala internal OPD dalam memenuhi beberapa indikator dalam LPPD dan LKPJ
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Optimalisasi penyelesaian permasalahan dan ketepatan waktu pengumpulan data LPPD dan LKPJ pada tenggat waktu yang telah ditentukan. Koordinasi aktif dengan OPD Pengampu LPPD dan LKPJ

e. Persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan produk hukum daerah
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Terlaksananya propemperda dan propemperkada sesuai waktu pelaksanaan yang telah disusun

f. Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, OPD terkait, dan anggota Forkompida Kab. Temanggung sehingga mempermudah pelaksanaan mediasi dan pencarian jalan keluar

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi di Kabupaten Temanggung

g. Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual
1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya perubahan kebijakan
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatkan jumlah rumah ibadah dan sarapras kegamaan kondisi baik

h. Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik
1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya perubahan kebijakan
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan jumlah rumah ibadah dan sarapras kegamaan kondisi baik

i. Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi
1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah terjadwalnya kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya perubahan kebijakan
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melaksanakan peringatan kegiatan keagamaan

j. Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi
1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah 1. Koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah 2. Kematangan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah 1. Ketidakefektifan koordinasi antar Perangkat Daerah

2. Ketidaktepatan dalam perencanaan

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
1. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah
2. Peningkatan kualitas perencanaan

k. Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Karena menjadi salah satu syarat dan kelengkapan pencairan GU, Tertib pelaporan administrasi dan keuangan.
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah 1. Kurang tertibnya admin dalam input data ke laporan setiap bulan; 2. Ketidaksesuain data.
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah 1. Tertib pelaporan; 2. Evaluasi pelaporan; 3. Admin baru segera menyesuaikan; 4. Koordinasi dengan PD terkait.

l. Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah APBD ditetapkan tepat waktu. Kesiapan Tim Pelaksana.
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah PD terlambat input dan yang diinput bukan data terbaru.
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Tertib pelaporan 2. Evaluasi pelaporan 3. Admin baru segera menyesuaikan 4. Koordinasi dengan PD terkait.

m. Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Permasalahan aduan barang bersubsidi yang dapat terselesaikan dengan koordinasi
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Aduan tidak disampaikan secara tertulis dan tidak disertai bukti dukung
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menghimbau agar aduan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen/ bukti pendukung

n. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah

Pembinaan dan Evaluasi BUMD yang dilaksanakan secara rutin

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pemeriksaan KAP atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilaksanakan pada awal tahun berikutnya, sehingga pada saat pelaporan triwulanan belum dapat diketahui gambaran opini laporan keuangan BUMD
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan pembinaan dan koordinasi secara intensif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama dengan Tim Pembina dan Dewan Pengawas terutama dalam pencatatan dan administrasi laporan keuangan

o. Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah
   1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.
   2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kinerja OPD belum mencatatkan kontrak PDN Penyedia
   3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025

p. Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan
   1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya tamu dan masyarakat yang memanfaatkan layanan Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
   2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Koordinasi dan keselarasan kinerja masih perlu diperkuat
   3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah komitmen untuk melaksanakan koordinasi dan penyelarasan kinerja yang lebih baik

q. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya sarana prasarana kegiatan kedinasan Kepala Daerah yang harus dipenuhi
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya perubahan kebutuhan sarana prasarana kedinasan yang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya dan adanya efisiensi anggaran. Adanya perubahan peraturan pengadaan barang/jasa
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan dan OPD terkait serta melaksanakan perubahan anggaran. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku dan koordinasi dengan Bagian PBJ

r. Indeks Reformasi Birokrasi
1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Sistem Penilaian baru (RB General dan RB Tematik) yang memungkinkan adanya indikator baru yang berdampak pada masyarakat (seperti kemiskinan)
2) Faktor Penghambat tersebut adalah RB belum terinternalisasi dengan baik dan menyeluruh di seluruh tataran unit kerja dan individu pegawai
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan evaluasi setiap triwulan sebelum adanya evaluasi dari KemenPANRB

s. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya tindaklanjut yang telah dilakukan dari evaluasi tahun sebelumnya
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum ada reward dan/atau punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menerapkan kebijakan reward dan/atau punishment yang telah disusun

t. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Perbaikan pelayanan dari hasil survei sebelumnya, mempermudah akses pelayanan, pemanfatan teknologi informasi
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas,

sarana dan prasarana yang belum semuanya baik

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Bimbingan teknis pelayanan prima bagi petugas layanMelakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi AKIP dari APIP Pemda

u. Nilai penyelenggaraan pelayanan publik

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kelengkapan dari sarana dan prasarana yang ada di unit pelayanan

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum semua sarpras terkait pelayanan yang dibutuhkan, tersedia

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan pada unit pelayanan yang akan dilakukan penilaian pada tahun berjalan

v. Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terpenuhinya SDM bagian prokompim

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Banyaknya kegiatan pimpinan, adanya kegiatan yang harus dilaksanakan diluar Agenda pimpinan, perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengkomunikasikan kegiatan pimpinan yang akan dilaksanakan dengan skala prioritas

2. Capaian indikator dengan status Sedang ada 1 terdiri dari:

a. Presentase pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Target untuk mengirimkan dokumen perencanaan, laporan keuangan,laporan kinerja, penilaian terhadap tertib administrasi umum dan terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah secara benar dan tepat waktu antara lain Laporan Keuangan Januari, Februari, Maret 2025, CALK 2024, Dokumen LKJIP 2024, PK 2025, Rencana aksi dan SKP.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya Adanya perubahan kebijakan maupun

kebijakan baru yang belum dapat diterapkan secara maksimal. Aplikasi yang sering maintenance

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan koordinasi dan kemampuan SDM, Koordinasi antar bagian yang dilaksanakan secara rutin dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait secara intensif

3. Capaian indikator dengan status Rendah ada 4 terdiri dari:

a. Persentase produk hukum yang difasilitasi

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Komitmen yang tinggi dari pegawai dan monitoring dari pimpinan

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari sarpras yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Optimalisasi pendokumentasian produk hukum daerah ke JDIH sesuai dengan jumlah produk hukum yang ditetapkan pada tahun berjalan

b. Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Dokumen kontrak menjadi syarat pencairan

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Efisiensi anggaran menyebabkan pekerjaan yang sudah dilelang tidak dilanjutkan kontraknya. Triwulan 1 sebagian besar pekerjaan belum dimulai.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah 1. Tingkatkan koordinasi internal dan eksternal; 2. Penetapan target yang realistis; dan 3. Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan. 4. Monitoring paket pekerjaan fisik. 5. Perencanaan diusahakan N-1 dan Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan juga pembinaan terhadap konsultan pengawas

c. Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kinerja OPD belum memenuhi dateline pengajuan Berita Acara Verifikasi Rencana Umum Pengadaan.
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025

d. Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement yang berhasil dilaksanakan
1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kinerja OPD belum memaksimalkan pengadaan secara e-Procurement.
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025

4. Capaian indikator dengan status Sangat Rendah ada 3 terdiri dari:
a. Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi
1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum, optimalnya penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan/non litigasi (semakin banyak penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan, maka meminimalisasi penyelesaian permasalahan secara litigasi)
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi di Kabupaten Temanggun Optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi di Kabupaten Temanggung

b. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
   1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Ketersediaan barang bersubsidi untuk mencukupi kebutuhan barang bersubsidi
   2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Agen/Pangkalan BBM dan LPG tidak melaporkan stok
   3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memastikan Kab. Temanggung mendapatkan kuota barang bersubsidi pada awal tahun. Memberikan sosialisasi dan monitoring secara berkala kepada agen/pangkalan LPG dan BBM

c. Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
   1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
   2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta.
   3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025

1.1.2.Data Pokok

Data Pokok pada Sekretariat Daerah terdiri dari 9 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra dan Bina Mental, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bagian Pemerintahan

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Penilaian EPPD dilakukan oleh Tim Nasional yang beranggotakan unsur kementerian dan/atau lembaga

pemerintah nonkementerian yang terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik.

Rumus Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja.

Penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1.	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2.	1.81 – 2.60	Rendah
3.	2.61 – 3.40	Sedang
4.	3.41 – 4.20	Tinggi
5.	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri Nomor 19 Tahun 2024

Nilai EPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020 nilainya 3,3453 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung berkinerja sangat tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Nilai EPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2024 atas LPPD Tahun 2023 adalah 3,2893 dengan kategori sedang. Kemudian untuk nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 masih menggunakan nilai EPPD Tahun 2024 dikarenakan nilai EPPD Tahun 2025 sampai pada Maret 2025 belum dilakukan perhitungan penilaian oleh Kemendagri.

Persentase Kerja Sama yang Diimplementasikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang dimaksud Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang

memuat hak dan kewajiban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Kerja Sama terdiri dari :

a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;
b. Sinergitas Antara Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal; dan
c. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Rumus presentase kerja sama yang diimplementasikan adalah jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti dan implementasikan dibagi jumlah kerja sama yang dilakukan dikali 100%

jumlah kerja sama yang diimplementasikan dari tahun 2019 dan 2020 n.a dikarenakan pada tahun tersebut tidak terdapat indikator program terkait presentase kerja sama yang diimplementasikan. Presentase kerja sama yang diimplementasikan dari tahun 2021-2025 adalah 100%. Setiap dinas terkait yang mengajukan kerja sama baik dengan daerah lain, instansi vertical, dan/atau pihak ketiga langsung ditindaklanjuti sampai selesai dan kemudian langsung diimplementasikan.

Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi tolok ukur pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penerapan SPM disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada Menteri Dalam Negeri yang datanya diinput oleh 7 (tujuh) OPD pengampu SPM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi SPM Bangda Kemendagri.

Rumus persentase pelaporan SPM yang melaporkan tepat waktu adalah Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM.

Perangkat Daerah pengampu SPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
5. Satpol PP dan Damkar;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;dan
7. Dinas Sosial.

Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan oleh bupati/ walikota kepada Menteri dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Selanjutnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) provinsi dan kabupaten/ kota adalah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan daerah.

Ruang lingkup penyampaian dalam LPPD mencakup

capaian kinerja pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Sementara ruang lingkup penyampaian dalam LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Dalam LPPD untuk capaian kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggara pemerinatahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dimana dalam capaian kinerja pemerintahan tersebut data diperoleh dari OPD pengampu terkait. Pengumpulan data dukung Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik LPPD dan LKPJ yang disusun selambat-lambatnya disampaikan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sehingga untuk pengumpulan data dari OPD pengampu terkait disampaikan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Rumus persentase perangkat daerah yang melaporkan LPPD dan LKPJ Tepat waktu adalah Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%.

Perangkat Daerah yang berkewajiban melaporkan LPPD dan LKPJ pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
h. Satpol PP dan Damkar;
i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
j. Dinas Sosial;
k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
l. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
u. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
v. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
w. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah;
x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
z. Rumah Sakit Umum Daerah

2. Data Pokok Bagian Kesra dan Bina Mental

Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik

Sarpras pendidikan keagamaan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan perananan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya (PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan). Batasan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik yaitu:

a. Keadaan fisik; terdapat ruang untuk perpustakaan tempat kitab suci dan buku keagamaan, terdapat ruang untuk bersuci, tempat parkir jamaah/ tempat alas kaki dll.
b. Sarana prasarana ; terdapat buku/kitab suci, tempat duduk (kursi atau alas lantai) semuanya tertata rapi bersih.
c. Organisasi Kepengurusan.

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan dikali 100%.

Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi

Definisi kegiatan kegamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, yang dijadikan sebagai rutinitas dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan pedoman dalam menjalin hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada umat manusia lainnya.

Rumus penghitungan persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi adalah jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang ada dikali 100%.

Jumlah kegiatan kegamaan yang ada selama ini dilaksanakan adalah:

a. Kegiatan Tarawih Silaturahim;
b. Peringatan Nuzulul Qur'an;
c. Peringatan Hari Santri Nasional;
d. Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an.

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Tarawih Silaturahim;
b. Peringatan Nuzulul Qur'an;
c. Kegiatan Pelaksanaan Ibadah Haji.

3. Data Pokok Bagian Hukum

Persentase Cakupan Bantuan Hukum, Layanan Hukum, dan Layanan Informasi Pelayanan Hukum yang Terfasilitasi

Penyelenggaraan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum di Kabupaten Temanggung dilaksanakan melliputi menyusun bahan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang hukum, penyelenggaraan sistem informasi, pelaporan bidang hukum, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, informasi dan dokumentasi hukum.

Rumus penghitungan dari persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi adalah jumlah cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang difasilitasi dibagi jumlah cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan

layanan informasi pelayanan hukum yang masuk dikali 100%.

Persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang masuk pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II sebesar 84,26% yang terdiri dari data bantuan hukum yang diberikan secara litigasi maupun non litigasi, fasilitasi pembuatan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, dan layanan informasi hukum (tersedia dalam JDIH Kabupaten Temanggung). Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 data persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum belum ada dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru. Daftar cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang masuk pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tercantum dalam keterangan pada indikator-indikator di bawah ini yaitu pada angka 2 (persentase produk hukum yang difasilitasi), angka 3 (persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH), angka 4 (persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi), dan angka 5 (persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi).

Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) terdapat tahapan penyusunan produk hukum daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

Pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Temanggung bisa diprakarsai oleh DPRD maupun Pemerintah Daerah yang kemudian dalam penyusunannya difasilitasi oleh Bagian Hukum.

Rumus penghitungan dari persentase Produk Hukum yang Difasilitasi adalah jumlah produk hukum yang difasilitasi dibagi jumlah produk hukum yang diajukan dikali 100%.

Produk Hukum yang Difasilitasi pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II sebesar 100%. Hal tersebut merupakan keseluruhan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati yang sudah diundangkan maupun yang masih dalam proses penyusunan.

Persentase Dokumentasi Perundangan Melalui JDIH

Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Adapun dokumentasi perundangan melalui JDIH merupakan peraturan perundang-undangan yang telah di dokumentasi melalui aplikasi JDIH, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Adapun dokumentasi perundangan melalui JDIH merupakan peraturan perundang-undangan yang telah di dokumentasi melalui aplikasi JDIH, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Rumus penghitungan persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH yakni jumlah perundangan yang didokumentasikan melalui JDIH dibagi jumlah perundangan yang dibuat dikali 100%

pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II, jumlah produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan belum semuanya terdokumentasi dalam JDIH Kabupaten Temanggung. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pendokumentasian.

Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Secara Non Litigasi

Permasalahan hukum adalah pengesahan suatu kasus adanya kekosongan hukum yaitu adanya kebutuhan hukum masyarakat yang belum atau tidak tertampung dalam peraturan perundang-undangan atau hukum baik

yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau hukum adat atau kebiasaan.

Non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar Pengadilan. Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi adalah permasalahan hukum yang diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Rumus penghitungan persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi adalah permasalahan hukum yang terselesaikan secara non litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi dikali 100%..

Penanganan perkara secara non litigasi baru dapat tertangani mulai tahun 2017 dikarenakan baru teranggarkan setelah banyak munculnya permasalahan yang dapat diselesaikan secara mediasi di luar pengadilan.

Beberapa perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dibahas bersama dengan unsur dinas terkait, pihak berperkara dan anggota Forkopimda Kabupaten Temanggung dengan dilakukan secara mediasi sehingga tidak perlu diproses sampai dengan persidangan.

Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Secara Litigasi

Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.

Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi adalah permasalahan hukum yang diselesaikan di pengadilan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Rumus penghitungan persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi yakni permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara litigasi dikali 100%.

Permasalahan dan perkara baik pidana maupun perdata yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi di luar persidangan harus ditempuh melalui persidangan. Demi efektif dan efisiennya penanganan perkara, Bagian Hukum melalui Sub bagian Bantuan Hukum menangani perkara-perkara yang muncul tanpa melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

4. Data Pokok Bagian Perekonomian

Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi

Definisi persentase ketersediaan produk barang bersubsidi adalah tingkat ketersediaan/kecukupan dari barang/jasa bantu yang diberikan Pemerintah Pusat untuk mengurangi beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat.

Rumus penghitungan dari persentase rata-rata ketersediaan produk barang bersubsidi adalah jumlah persentase ketersediaan barang bersubsidi dibagi jumlah jenis barang bersubsidi dikali 100%. Sedangkan rumus perhitungan persentase setiap jenis barang bersubsidi adalah realisasi jumlah barang bersubsidi dibagi jumlah kebutuhan barang.

Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi

Definisi persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi adalah presentase aduan/pelaporan masalah produk barang bersubsidi yang tertangani dari proses distribusi barang/jasa bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk mengurangi beban yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat.

Rumus perhitungan dari persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi adalah jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan dibagi laporan permasalahan barang subsidi.

Adapun laporan atau aduan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut: Terdapat aduan secara lisan dari masyarakat pada awal bulan Maret 2025 terkait meningkatnya permintaan terhadap gas bersubsidi LPG 3 Kg menjelang hari besar keagamaan nasional Ramadhan – Hari Raya Idul Fitri 2025. Hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan permohonan tambahan quota fakultatif ke Pertamina.

Persentase BUMD dengan opini WTP atas Pemeriksaan KAP

Opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Pengertian KAP (Kantor Akuntan Publik) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya, jasa itu misalnya jasa pemeliharaan, manajemen akuntansi, perpajakan dan pembukuan.

Opini WTP merupakan pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK).

Definisi persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP adalah jumlah BUMD di Kabupaten Temanggung yang laporan keuanganya dengan opini WTP atas hasil audit KAP.

Rumus perhitungan dari persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP adalah jumlah BUMD dengan Opini WTP dibagi dengan jumlah BUMD. Perhitungan rumus ini dengan data kinerja Laporan Keuangan BUMD tahun sebelumnya yang diaudit KAP (*n-1*). Sehingga untuk pelaporan tahun 2025 adalah atas hasil audit KAP atas laporan keuangan BUMD tahun 2024.

BUMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) BUMD, sedangkan 1 (satu) BUMD mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2025 atas presentase BUMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik telah tercapai 100% dari target yang ditentukan yaitu 83,33%.

Persentase jumlah Bank di Daerah yang memberi Layanan Pinjaman kepada dunia usaha

Bank dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Rumus persentase jumlah Bank di daerah yang memberi layanan pinjaman kepada dunia usaha adalah jumlah bank di daerah yang memberikan pinjaman kepada dunia usaha dibagi jumlah bank diseluruh Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Persentase jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan dengan tugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung.

Jumlah LKBB yang terdaftar adalah 199 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan). LKBB di Kabupaten Temanggung yang memberikan layanan pinjaman kepada dunia usaha terdiri dari UED-SP, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Unit Desa dan Pegadaian. Rumus perhitungan persentase jumlah LKBB yang memberikan layanan pinjaman kepada dunia usaha adalah LKBB di Kabupaten Temanggung yang memberi layanan pinjaman kepada dunia usaha dibagi jumlah LKBB di Kabupaten Temanggung dikali 100%.

5. Pokok Bagian Pembangunan

Persentase Paket Pekerjaan Selesai Tepat Waktu

Realisasi persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2022 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Rumus persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu yaitu jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan dibagi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun

anggaran berjalan dikali 100%.
Pada Triwulan ke II 2025 ini 57 paket pekerjaan yang selesai dengan tepat waktu dengan presentasi 14,11.

Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu

Pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah pelaporan seluruh kegiatan Perangkat Daerah /Unit Kerja yang dilaporkan melalui aplikasi Simpelbangda.
Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu adalah pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selesai dilaksanakan tepat waktu.

Rumus Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu adalah jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja dikalikan 100%.
Pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja di triwulan II tahun 2025 ini yaitu sebesar 100%.

Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kegiatan Perangkat Daerah adalah capaian kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
Persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah adalah rata-rata capaian kegiatan fisik seluruh Perangkat Daerah.

Rumus Persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah adalah rata-rata realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat daerah dibagi rata-rata target fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dikalikan 100%.
persentase realisasi fisik capaian kegiatan PD pada tahun 2022 sampai dengan 2025 Triwulan II cenderung fluktuatif. Persentase target fisik capaian kegiatan PD pada tahun 2022 sampai dengan 2025 tetap sebesar 100% dan target fisik 2023 turun menjadi 99,97%. Target tidak 100% disebabkan karena ada beberapa anggaran PD yang merupakan dana darurat, yang mana dana darurat tersebut digunakan apabila terjadi kondisi atau keadaan darurat. Meskipun target fisik capaian kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 turun, di triwulan ke IV ini baru mencapai 88,84% dikarenakan

laporan per bulan Desember 2024 karena pelaporan simpelbangda perbulan dan saat dibuatnya laporan ini PD belum melaksanakan pelaporan bulan Desember. Presentase pelaporan kegiatan PD pada Triwulan II tahun 2025 mengalami kenaikan .

6. Data Pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan

Definisi dari Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan adalah Keseluruhan penginputan pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada SIRUP dibandingkan total pagu anggaran APBD pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Rumus penghitungan dari Total nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada SIRUP dibagi Total nilai pagu anggaran APBD pengadaan barang/jasa dikali 100%.

Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada Triwulan II tahun 2025 dengan capaian sebesar 57,15% dari Total nilai pagu anggaran APBD pengadaan barang/jasa adalah senilai Rp 242.578.707.321. Total nilai pagu anggaran APBD pengadaan barang/jasa senilai Rp 424.491.100.647 adalah pagu klarifikasi Rencana Umum Pengadaan ke LKPP dan belum merupakan pagu anggaran APBD pengadaan barang/jasa yang mengalami efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Nomor 903/009 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025.

Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement yang berhasil dilaksanakan

Penerapan *e-procurement* perlu dilakukan secara bertahap guna penerapan yang semakin baik. Secara umum tahapan pelaksanaan *e-procurement* dibagi dalam 4 (empat) tahap, yaitu: Penayangan Informasi, terdiri dari informasi umum dan informasi paket pekerjaan;

1. Proses CTI (C*opy To Internet*), yaitu penerapan *e-Procurement* melalui penayangan informasi, proses, dan hasil pengadaan barang/jasa;
2. Pelaksanaan semi *e-procurement* yaitu kegiatan pengadaan barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang;
3. Pelaksanaan *full e-procurement* yaitu proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet, namun dalam pelaksanaanya *full e-procurement* belum dapat dilakukan di Indonesia.

Berdasarkan peraturan, rumus penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan barang/jasa dilihat dari Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* yang berhasil dilaksanakan dibagi Jumlah keselurahan paket pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* yang ada di SIRUP dikali 100%.
Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement yang berhasil dilaksanakan di Triwulan II tahun 2025 dengan capaian sebesar 52,61% dengan Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement yang berhasil dilaksanakan sejumlah 1541 paket dari Jumlah keselurahan paket pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement yang ada di SIRUP sebanyak 2929 paket. Faktor pendorong yang mempengaruhi persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan adalah Penerbitan Perpres No. 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana mewajibkan pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* untuk barang/jasa yang sudah tersedia di e-katalog dan toko daring. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan adalah Kinerja OPD belum memaksimalkan pengadaan barang/jasa secara *e-Procurement.*

Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pencatatan Non-Tender dapat dilaksanakan dengan menerapkan beberapa faktor yaitu :

1. Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada aplikasi SPSE dan diakses melalui https://spse.inaproc.id/temanggungkab ;
2. Dalam pelaksanaan pencatatan non-tender pada aplikasi SPSE perlu kedisiplinan pelaporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk mencatatkan pengadaan barang/jasa non-tender dibawah Rp. 100.000.000,00.

Rumus dalam perhitungan Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Jumlah paket pengadaan barang/jasa non tender bernilai paling banyak 100 juta yang sudah dicatatkan pada SPSE dibagi Jumlah keseluruhan paket pengadaan barang/jasa non tender bernilai paling banyak 100 juta yang ada di SIRUP dikali 100%.

Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Triwulan II tahun 2025 dengan capaian sebesar 13.02% dari keseluruhan paket non tender bernilai paling banyak 100 Juta yang ada di SIRUP sebanyak 3104 Paket, yang sudah dicatatkan sebanyak 404 Paket, jadi masih ada 2700 Paket yang belum dicatatkan di Pencatatan Non Tender SPSE. Faktor pendorong yang mempengaruhi persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah penerbitan Surat Edaran Nomor 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan dibawah 100 juta.

7. Data Pokok Bagian Umum

Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah dapat dihitung dari terpenuhinya laporan Perencanaan, laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, laporan keuangan, dan administrasi lainnya. Laporan tersebut terdiri dari : Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA Penetapan dan Perubahan, DPA Penetapan dan Perubahan, Pohon Kinerja, Cascading, IKU, Evaluasi Triwulan, IKPD, Data Pokok, RTP Operasional, RTP Strategis, RKT, Rencana Aksi, LKJIP, CALK, Laporan Keuangan Bulanan, E-Wali Data, RFK, Sirup, Laporan Aset, Rekon BMD, PK, SKP, KGB, Prospek Bisnis. Adapun rumus Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah adalah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi dibagi jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dikali 100. pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025 Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah telah tercapai 71 %. Pada triwulan II jumlah laporan yang dikirimkan adalah Laporan Keuangan Januari, Februari, Maret, CALK, LKJIP, Perjanjian Kinerja, dan SKP, Ranwal Renstra dan Perubahan Renja Tahun 2025. Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah merupakan kegiatan pelaporan yang rutin dilaksanakan sehingga target akan tercapai pada akhir tahun atau pada triwulan IV.

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah adalah terpenuhinya kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. Rumus Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah yaitu jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang seharusnya terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dikali 100%.

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025 direalisasikan pada Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Pimpinan Daerah yang didukung kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

8. Data Pokok Bagian Organisasi

Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Evaluasi Eksternal RB melibatkan peran Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan /atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
2. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau

Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi

Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2025 masih menggunakan data tahun sebelumnya yaitu sebesar 86,13 dikarenakan Tahun 2025 masih belum ada penilaian Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, tetapi apa yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan, dan kedepan hal ini harus menjadi prioritas agar Reformasi Birokrasi yang dilakukan harus berdampak nyata terhadap pembangunan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Rumus penghitungan untuk indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah jumlah total nilai IKM semua unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2024 karena nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 masih dalam tahap pelaksanaan survey dan hasilnya akan diketahui pada bulan November tahun 2025.

Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik.

nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sebesar 1,97 point dari 84,97 (BAIK) pada tahun 2023 menjadi 86,91 (BAIK) pada tahun 2024.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2024 karena hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 belum dilaksanakan, akan tetapi untuk bukti dukung sudah di unggah melalui aplikasi e-SAKIP Reviu Kementerian PANRB. Hasil evaluasi atas akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa nilai sebesar 66,36 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB

Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB adalah penilaian terhadap beberapa indikator akuntabilitas kinerja dalam suatu Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan berdasarkan

pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat. Rumus penghitungan dari persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB adalah jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai BB keatas dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%.

Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB merupakan indikator baru pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Jika diambil dari nilai evaluasi SAKIP tahun 2025, persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB sebesar 84,78 %.

9. Data Pokok Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah adalah kebutuhan kedinasan kepala daerah dalam Kegiatan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah danterbayarnya iuran APKASI.

Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani adalah terpenuhinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah yang diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

Rumus Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani yaitu Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang seharusnya dilayanai dibagi Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang dilayanai dikali 100%.

Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 Triwulan II adalah sebesar 100%. Adapun tahun 2020 belum terisikan karena Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan baru terbentuk pada tahun 2021 dengan adanya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 TentangKedudukan, Susunan Organisasi Dan ata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Sekretariat Daerah dari 29 indikator terdapat 7 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
   - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
     Disebabkan Nilai EPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2024 masih menggunakan nilai EPPD Tahun 2023 atas LPPD Tahun 2022 karena nilai EPPD Tahun 2024 atas LPPD 2023 belum diumumkan penilaiannya.
   - Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum
     Hal ini disebabkan data persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum belum ada dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.
   - Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual
     Hal ini disebabkan jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual sebanyak 6 kebijakan, sedangkan jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual yang disusun sebanyak 4 kebijakan.
   - Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Selesai Tepat Waktu
     Hal ini disebabkan Kinerja OPD belum melaksanakan kegiatan secara tepat waktu.
   - Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu
     Hal ini disebabkan kurang tertibnya admin dalam input data ke laporan setiap bulan dan terdapat ketidaksesuain data dan mutasi admin aplikasi
   - Persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah

Hal ini disebabkan proses perencanaan dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan lelang dan pekerjaan terlambat serta PD terlambat input sedangkan yang diinput bukan data terbaru

- Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

  Hal ini disebabkan Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 50 juta. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah membuat surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor: B/218/050/01/X/2023 tentang Pencatatan Non Tender pada SPSE

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, antara lain :
   - Keterbatasan anggaran (efisiensi anggaran) dalam pelaksanaan kegiatan
   - Kurangnya Koordinasi antar Perangkat Daerah
   - Perubahan kebijakan yang dinamis
   - Adanya perubahan kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan mendadak yang harus dilaksanakan diluar rencana.

   Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :
   - Memaksimalkan kegiatan dengan anggaran yang tersedia
   - Meningkatkan kemampuan SDM
   - Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah
   - Meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah

2.4. *Review* terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan anggaran sebagai berikut :
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp 30.000.000,-
2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 22.000.000,-
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 2.500.140.000,-
4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp 1.500.000.000,- untuk 1 unit kendaraan dinas Bupati dan 1 unit kendaraan dinas Wakil Bupati.
5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan sebesar Rp 3.503.412.000 untuk 1 unit kendaraan tahanan kejaksaan dan 5 unit kendaraan Kepala PD.
6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel sebesar Rp. 10.000.000,-
7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 19.900.000,- untuk pemeliharaan gamelan.
8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp 500.000.000,- dan aspirasi dewan sebesar Rp 200.000.000,- untuk perbaikan atap eks Kantor BPBD Temanggung.
9) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 300.000.000,-
10) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 40.000.000,-

11) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah sebesar Rp 180.000.000,-
12) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 78.000.000,-

b. Program Perekonomian dan Pembangunan
1) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan sebesar Rp 650.000.000,00,- untuk kegiatan DBHCHT.

2. Terdapat pengurangan anggaran pada
a. Program Perekonomian dan Pembangunan sebagai berikut :
1) Kegiatan Pelaksanaan kebijakan perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD sebesar Rp. 25.000.000,-
b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan sebesar Rp 545.199.500,-.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**SEKRETARIAT DAERAH**					**29.846.770.921**	1	**SEKRETARIAT DAERAH**					**35.050.182.921**	
A.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**225.000.000**	**A.**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**225.000.000**	
	(BAGIAN PEMERINTAHAN)													
1	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kab. Temanggung**				**210.000.000**	1	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kab. Temanggung**				**210.000.000**	
	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12	dokumen	15.000.000		Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12	dokumen	15.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12	dokumen	15.000.000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12	dokumen	15.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6	dokumen	180.000.000		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6	dokumen	180.000.000	
2	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Kab. Temanggung**				**15.000.000**	2	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Kab. Temanggung**				**15.000.000**	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12	dokumen	15.000.000		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12	dokumen	15.000.000	
B	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**912.000.000**	**B**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**912.000.000**	
	(BAGIAN HUKUM)							**(BAGIAN HUKUM)**						
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Kab. Temanggung**				**912.000.000**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kab. Temanggung**				**912.000.000**	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	111	dokumen	50.000.000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	111	dokumen	50.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30	kasus	832.000.000		Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30	kasus	832.000.000	

	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	111	dokumen	30.000.000
C.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**948.630.000**
	(BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL)					
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Kab. Temanggung**				**948.630.000**
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2	dokumen	250.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	dokumen	60.630.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	dokumen	638.000.000
D.	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**127.500.000**
	(BAGIAN PEREKONOMIAN)					
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					**127.500.000**

	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	111	dokumen	30.000.000
C.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**948.630.000**
	(BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL)					
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Kab. Temanggung**				**948.630.000**
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2	dokumen	250.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	dokumen	60.630.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	dokumen	638.000.000
D.	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**752.500.000**
	(BAGIAN PEREKONOMIAN)					
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					**102.500.000**

	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	dokumen	75.000.000
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	laporan	52.500.000
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					**0**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5	Dokumen	0
E	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**68.303.400**
	(BAGIAN PEMBANGUNAN)					
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			**5**	**dokumen**	**68.303.400**
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	dokumen	20.736.000
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	laporan	47.567.400
F	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**47.390.100**
	(BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)					
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					**47.390.100**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	120	dokumen	12.000.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	170	dokumen	30.000.000

	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	dokumen	50.000.000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	laporan	52.500.000	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					**650.000.000**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5	Dokumen	650.000.000	Penambahan Anggaran untuk kegiatan DBHCHT
E	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**68.303.400**	
	(BAGIAN PEMBANGUNAN)						
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			**5**	**dokumen**	**68.303.400**	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	dokumen	20.736.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	laporan	47.567.400	
F	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**47.390.100**	
	(BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)						
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					**47.390.100**	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	120	dokumen	12.000.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	170	dokumen	30.000.000	

	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	103	orang	5.390.100
G	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN ORGANISASI)**					**108.687.500**
	Penataan Organisasi					**108.687.500**
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	dokumen	20.000.000
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	laporan	50.000.000
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	dokumen	38.687.500
H	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN PROKOMPIM)**					**1.908.186.500**
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					**600.000.000**
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Org/bln	600.000.000
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					**1.308.186.500**
	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	laporan	301.788.000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	laporan	832.800.500
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	laporan	173.598.000
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN UMUM)**					**20.990.833.921**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**14.256.755.678**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	Org/bln	14.256.755.678

	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	103	orang	5.390.100
G	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN ORGANISASI)**					**108.687.500**
	Penataan Organisasi					**108.687.500**
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	dokumen	20.000.000
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	laporan	50.000.000
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	dokumen	38.687.500
H	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN PROKOMPIM)**					**2.453.386.000**
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					**600.000.000**
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Org/bln	600.000.000
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					**1.853.386.000**
	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	laporan	301.788.000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	laporan	1.378.000.000
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	laporan	173.598.000
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN UMUM)**					**29.534.285.921**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**14.256.755.678**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	Org/bln	14.256.755.678

	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**1.890.000.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	70.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	100.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	280.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	40.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	1.000.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	400.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**0**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	unit	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**1.104.868.750**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	10.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	1.094.868.750

	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**1.942.000.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	100.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	122.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	280.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	40.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	1.000.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	400.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**5.003.412.000**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	1.500.000.000	2 unit kendaraan Bupati dan Wabup,
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	unit	3.503.412.000	5 unit kendaraan Kepala PD, 1 unit kendaraan tahanan untuk kejaksaan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**3.605.008.750**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	10.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	1.094.868.750

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lapor an	2.500.140.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**1.490.000.000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**2.219.900.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	unit	250.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	unit	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	unit	750.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	unit	750.000.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	120	unit	40.000.000		Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	120	unit	50.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	unit	50.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	unit	50.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	unit	0		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	unit	19.900.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit	400.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	unit	1.100.000.000	Penambahan anggaran aspirasi Rp 200.000.000,- untuk pemeliharaan Gedung eks BPBD
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					**169.662.743**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**					**509.662.743**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Org/bln	169.662.743		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Org/ bln	169.662.743	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50	paket	0		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50	paket	300.000.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	orang	0		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	orang	40.000.000	

	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					**1.739.546.750**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**					**1.997.546.750**	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	paket	300.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	paket	480.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	paket	282.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	paket	360.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	paket	1.157.546.750		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	paket	1.157.546.750	

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program

dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2022-2024

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Layanan Bantuan Hukum berbasis web	Bagian Hukum, OPD dan Masyarakat umum Kabupaten Temanggung	APBD	Layanan baru dari Bagian Hukum yaitu menyediakan website resmi dalam rangka pemberian bantuan hukum	Website resmi bantuan hukum	Meningkatnya penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi dan non litigasi	Bagian Hukum-2023
2	Unit Layanan Administrasi	Bagian Umum	APBD	Layanan baru dari Bagian Umum yaitu menyediakan jasa Layanan Administrasi baik persuratan maupun administrasi lainnya	Layanan Administrasi	Meningkatkan layanan administrasi antara pengguna Layanan Administrasi (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, OPD, Masyarakat)	Bagian Umum – 2025

2.6. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Sekretariat Daerah ada 4 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2022-2024

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022 (dalam rangkaian peringatan HAM sedunia ke-75 tahun 2023)	Menteri Hukum dan HAM	Nasional	Bagian Hukum Setda Kab Temanggung
2	Pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota dengan Progres Pencapaian Terbaik	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Bagian Hukum Setda Kab Temanggung

3	Nilai EPPD Tahun 2022 Atas LPPD Tahun 2021 (Nilai 3,05 predikat sedang)	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Temanggung
4	Nilai EPPD Tahun 2023 Atas LPPD Tahun 2022 (Nilai 3,4340 predikat tinggi)	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Temanggung
5	Nilai EPPD Tahun 2024 Atas LPPD Tahun 2023 (Nilai 3,2983 predikat sedang)	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Temanggung
6	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Nilai 97,06/Zona Hijau/Kualitas Tertinggi)	Ketua Ombudsman Republik Indonesia	Nasional	Bagian Organisasi Setda Kab. Temanggung
7	Peringkat III Kategori Kabupaten/Kota Indeks Perkembangan Harga Terbaik Tahun 2024 pada Kegiatan Inspiring Economics Effort Awards Tahun 2024	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang secara tidak langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, EKPPD, Pilar Batas, Indeks Kualitas Kebijakan, IKM, AKIP, Indeks Reformasi Hukum, dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ). Kebijakan nasional yang diampu oleh Sekretariat Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui pelaporan SPM, penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah, inventarisir pilar batas penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), Indeks Kualitas Kebijakan, IKM, Indeks Reformasi Hukum, dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) yang dilakukan oleh Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah dalam rangka akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2030
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien			Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	angka	48,35	48,55
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	angka	67,5	71,5
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	angka	3,46	3,5
	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum		Indeks Reformasi Hukum (IRH)	angka	97,08	97,48
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang bina mental spiritual		Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual	%	100	100
	Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	angka	85,5	87,5
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	angka	74	76,25
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah		IKM Sekretariat Daerah	angka	81,25	82,25

		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
		Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	%	100	100
		Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100	100
		Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100	100
			Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100
			Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	%	100	100
		Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	80	80
			Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	87,84	92
		Program Perekonomian dan Pembangunan				
		Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100

			Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33
		Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	95 - 100	95 - 100
			Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100	100
			Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100
		Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	%	100	100
			Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	100	100
			Presentase Pendampingan proses PBJ	%	100	100
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	100	100
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	angka	3,8	3,9

		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	angka	74,25	75
		Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100
		Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100
		Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah			

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temangung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Pagu Indikatif**	**Pagu Indikatif**
1	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**225.000.000**	**1**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**225.000.000**	**0**
	Administrasi Tata Pemerintahan	**210.000.000**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**210.000.000**	**0**
	Penataan Administrasi Pemerintahan	15.000.000		Penataan Administrasi Pemerintahan	15.000.000	0
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	15.000.000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	15.000.000	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	180.000.000		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	180.000.000	0
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**15.000.000**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**15.000.000**	0
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15.000.000		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15.000.000	0
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**912.000.000**	**2**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**912.000.000**	**0**
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**912.000.000**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**912.000.000**	**0**
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	50.000.000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	50.000.000	0
	Fasilitasi Bantuan Hukum	832.000.000		Fasilitasi Bantuan Hukum	832.000.000	0
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	30.000.000		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	30.000.000	0
3	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**948.630.000**	**3**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**948.630.000**	**0**
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**948.630.000**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**948.630.000**	**0**
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	250.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	250.000.000	0
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	60.630.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	60.630.000	0
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	638.000.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	638.000.000	0

4	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**752.500.000**	**4**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**752.500.000**	0
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**102.500.000**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**102.500.000**	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50.000.000	0
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	52.500.000		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	52.500.000	0
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**650.000.000**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**650.000.000**	0
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	650.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	650.000.000	0
5	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**68.303.400**	**5**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**68.303.400**	0
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**68.303.400**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**68.303.400**	0
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	20.736.000		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	20.736.000	0
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	47.567.400		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	47.567.400	0
6	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**47.390.100**	**6**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**47.390.100**	**0**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**47.390.100**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**47.390.100**	**0**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12.000.000		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12.000.000	0
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	30.000.000		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	30.000.000	0
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.390.100		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.390.100	0
7	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**108.687.500**	**7**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**108.687.500**	**0**
	Penataan Organisasi	**108.687.500**		**Penataan Organisasi**	**108.687.500**	**0**
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20.000.000		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20.000.000	0
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50.000.000		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50.000.000	0
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		0

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	38.687.500		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	38.687.500	0
8	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.453.386.000**	**8**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.453.386.000**	**0**
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**600.000.000**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**600.000.000**	**0**
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	0
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**1.853.386.000**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**1.853.386.000**	**0**
	Fasilitasi Keprotokolan	301.788.000		Fasilitasi Keprotokolan	301.788.000	0
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.378.000.000		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.378.000.000	0
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	173.598.000		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	173.598.000	0
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.534.285.921**	**9**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.534.285.921**	**0**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**14.256.755.678**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.256.755.678**	**0**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.256.755.678		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.256.755.678	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.942.000.000**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.942.000.000**	**0**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.000.000	**0**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	280.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	280.000.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**5.003.412.000**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.003.412.000**	0

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000.000		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000.000	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.503.412.000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.503.412.000	**0**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	**0**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.605.008.750**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.605.008.750**	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.094.868.750		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.094.868.750	**0**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.500.140.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.500.140.000	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.219.900.000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.219.900.000**	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000.000	**0**
	Pemeliharaan Mebel	50.000.000		Pemeliharaan Mebel	50.000.000	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	0
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.100.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.100.000.000	0
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**509.662.743**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**509.662.743**	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.662.743		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.662.743	0

	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	**0**
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	0
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**1.997.546.750**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.997.546.750**	0
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	480.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	480.000.000	0
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	360.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	360.000.000	**0**
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.157.546.750		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.157.546.750	0
JUMLAH		**35.050.182.921**	**JUMLAH**		**35.050.182.921**	**0**

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temangung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2026 sehingga anggaran tetap/ sebesar Rp. **35.050.182.921**,-

Tabel 4. 2

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PEMERINTAHAN						**225.000.000,00**							**320.750.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**225.000.000,00**							**320.750.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**225.000.000,00**							**320.750.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik***	**-**			**100%**	**225.000.000,00**						**-**	**320.750.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	-			100%	210.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Perangkat Daerah	-	297.250.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dan Pelaksanaan Otonomi Daerah				30 Dokumen									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi	Perangkat Daerah		20.750.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

											narkoba, judi, dan pe nyeludupan	birokrasi dan roadmap program prioritas				
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Perangkat Daerah		19.500.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Perangkat Daerah		257.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	-			12 Dokumen	15.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	OPD dan masyarakat	-	23.500.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
			Persentase terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri				100%									
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	OPD dan masyarakat		23.500.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PEMERINTAHAN						**225.000.000,00**							**320.750.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**225.000.000,00**							**320.750.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**225.000.000,00**							**320.750.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik***	**-**			**100 %**	**225.000.000,00**						**-**	**320.750.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administ rasi Tata Pemerint ahan	*Persentase terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dan Pelaksanaan*	-			100 % 30 Dokumen	210.000.000,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Perangkat Daerah	-	297.250.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

			Otonomi Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Perangkat Daerah		20.750.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Perangkat Daerah		19.500.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Perangkat Daerah		257.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN HUKUM						**912.000.000,00**							**1.267.040.600,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**912.000.000,00**							**1.267.040.600,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**912.000.000,00**							**1.267.040.600,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase produk hukum yang difasilitasi, dokumentasi perundangan melalui JDIH, penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi, penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin***	**-**			**100%**	**912.000.000,00**						**-**	**1.267.040.600,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Dokumen Hasil Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, Jumlah Permasalahan hukum secara litigasi dan non litigasi yang difasilitasi, Jumlah Peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan melalui JDIH*	-			252 Dokumen	912.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	OPD dan masyarakat	-	1.267.040.600,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03. 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														

			0				100 0	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	OPD dan masyarakat		50.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03. 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				30 Kasus	832.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	OPD dan masyarakat		1.186.240.600,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03. 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				100 Dokumen	30.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	OPD dan masyarakat		30.300.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL						**948.630.000,00**							**1.625.008.700,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**948.630.000,00**							**1.625.008.700,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**948.630.000,00**							**1.625.008.700,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi dan Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik***	-			**100%**	**948.630.000,00**						-	**1.625.008.700,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Persentase terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian*	-			4 Dokumen	948.630.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	OPD dan masyarakat	-	1.625.008.700,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL

			Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				100%				.					
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	OPD dan masyarakat		310.008.700,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	60.630.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	OPD dan masyarakat		65.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														

			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			1 Dokumen	638.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	OPD dan masyarakat		1.250.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PEREKONOMIAN						**752.500.000,00**							**153.025.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**752.500.000,00**							**153.025.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**752.500.000,00**							**153.025.000,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	-	-				**752.500.000,00**	-						**153.025.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	102.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	OPD dan masyarakat	-	153.025.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			0				4 dokumen 0	50.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	OPD dan masyarakat		100.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

			0				2 dokumen 0	52.500.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	OPD dan masyarakat		53.025.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03. 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*	-			2 Dokumen	650.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	-	Masyarakat Kabupaten Temanggung	-	0	BAGIAN PEREKONOMIAN
			Persentase terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD,				100%				.					
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
	4.01.03. 2.04.000 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				5 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	-	Masyarakat Kabupaten Temanggung		0	BAGIAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PEMBANGUNAN						**68.303.400,00**							**119.157.881,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**68.303.400,00**							**119.157.881,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**68.303.400,00**							**119.157.881,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	-		-			**68.303.400,00**					-		**119.157.881,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-		-			68.303.400,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Perangkat Daerah		119.157.881,00	BAGIAN PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	20.736.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Perangkat Daerah		24.100.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														

			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	47.567.400,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Perangkat Daerah		95.057.881,00	BAGIAN PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						**47.390.100,00**							**138.246.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**47.390.100,00**							**138.246.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**47.390.100,00**							**138.246.800,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan, Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Pendampingan proses PBJ	-			100%	**47.390.100,00**						-	**138.246.800,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Presentase terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Jumlah Layanan Pengadaan Secara*	-			100% 12 Bulan	47.390.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan		OPD dan masyarakat		138.246.800,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

			Elektronik, Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				98 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan		OPD dan masyarakat		49.355.200,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	OPD dan masyarakat		88.891.600,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				86 Orang	5.390.100,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	OPD dan masyarakat		0	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN UMUM						**29.534.285.921,00**							**26.830.507.553,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**29.534.285.921,00**							**26.830.507.553,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**29.534.285.921,00**							**26.830.507.553,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai AKIP Sekretariat Daerah***	-			**77 angka**	**29.534.285.921,00**							**26.830.507.553,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			125 Orang/ Bulan	14.256.755.678,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Seluruh ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung		14.328.710.810,00	BAGIAN UMUM
			Jumlah laporan administrasi keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia				14 Laporan									
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				111 0	14.256.755.678,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan	Seluruh ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung		14.328.710.810,00	BAGIAN UMUM

										dan pe nyeludupan	roadmap program prioritas				
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, fasililitasi kunjungan tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			12 paket	1.942.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, OPD	-	2.350.000.000,00	BAGIAN UMUM
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Paket				.				
			Persentase capaian indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				100%								
			Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah												
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor													

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	100.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, OPD		100.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.0 1.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	122.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, OPD		150.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.0 1.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	280.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, OPD		350.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.0 1.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, OPD		50.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, OPD		1.200.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	400.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, OPD		500.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*		-		2 Unit	5.003.412.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi	Bupati, Wakil Bupati		0	BAGIAN UMUM

											dan pe nyeludupan	dan roadmap program prioritas				
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati		0	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	3.503.412.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati		0	BAGIAN UMUM

	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan	3.605.008.750,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	-	4.115.134.000,00	BAGIAN UMUM
			Jumlah Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serta Jasa Pelayanan Umum Kantor				100%				.					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan									
							12 bulan									
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung		15.000.000,00	BAGIAN UMUM
											.					

	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.094.868.750,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung		1.098.400.000,00	BAGIAN UMUM
											.				
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.500.140.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung		3.001.734.000,00	BAGIAN UMUM
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.500.140.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung		3.001.734.000,00	BAGIAN UMUM

	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase capaian indikator Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya, aset tetap lainnya, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	-			100% 6 paket	2.219.900.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	-	2.445.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	250.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung		250.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	750.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung		1.000.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				120 Unit	50.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung		75.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	50.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung		100.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	19.900.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung		20.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung		1.000.000.000,00	BAGIAN UMUM

	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan, mengikuti Medical Check Up, dan Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan, Persentase terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	-			2 Orang/ Bulan 100 % 16 Orang/ Bulan	509.662.743,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati dan Wakil Bupati		509.662.743,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	169.662.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati dan Wakil Bupati		169.662.743,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				50 Paket	300.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati dan Wakil Bupati		300.000.000,00	BAGIAN UMUM

	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	40.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati dan Wakil Bupati		40.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase capaian indikator Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	-			100%	1.997.546.750,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan OPD		3.082.000.000,00	BAGIAN UMUM
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Rumah Tangga Sekretariat Daerah				36 paket								
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	480.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	Bupati, Wakil Bupati dan OPD		300.000.000,00	BAGIAN UMUM

												program prioritas				
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	360.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan OPD		282.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	1.157.546.750,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Bupati, Wakil Bupati dan OPD		2.500.000.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN ORGANISASI						**108.687.500,00**							**310.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**108.687.500,00**							**310.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**108.687.500,00**							**310.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan dan Indeks Pelayanan Publik (IPP)***	-			**100%**	**108.687.500,00**							**310.000.000,00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*	-			100 undefined	108.687.500,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Perangkat Daerah		310.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan, Jumlah Kegiatan Bimtek Pelayanan Prima dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Jumlah Fasilitasi Kegiatan PMPRB, Jumlah Fasilitasi Kegiatan SKM dan FKP, Jumlah Dokumen LKJIP Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja Bupati dan Kepala Perangkat Daerah				10 Dokumen							.	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan															
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Perangkat Daerah		100.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
											.					
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

			0				0 0	50.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Perangkat Daerah		110.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
																.
	4.01.01. 2.13.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	38.687.500,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	-	Perangkat Daerah		100.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						**2.453.386.000,00**							**2.744.339.632,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.453.386.000,00**							**2.744.339.632,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.453.386.000,00**							**2.744.339.632,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah***	**-**			**100%**	**2.453.386.000,00**						**-**	**2.744.339.632,00**	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* *Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	-			100% 16 Orang/ Bulan	600.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Pimpinan Daerah, OPD dan masyarakat	-	600.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIK ASI PIMPINAN
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				192 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Pimpinan Daerah, OPD dan masyarakat		600.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	-			3300	1.853.386.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Pimpinan Daerah, OPD dan masyarakat		2.144.339.632,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
			Persentase Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Laporan 100 %				.					
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 dokumen Laporan	301.788.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Pimpinan Daerah, OPD dan masyarakat		500.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	1.378.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pimpinan Daerah, OPD dan masyarakat		1.244.339.632,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	173.598.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Pimpinan Daerah, OPD dan masyarakat		400.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

BAB V
PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat Daerah untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat Daerah itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan IV Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung didukung anggaran sebesar Rp. 67.674.775.390,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.415.209.360,- (97%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.259.566.030,- (3%). Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II terdiri dari Belanja Operasional sebesar 24,15 %, realisasi Belanja Modal sebesar 3,37 %, Belanja Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 58.257.414.638,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.720.260.994,- (23,55 %)

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Sekretariat Daerah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 35.050.182.921,- yang terdiri dari 3 (tiga) program antara lain Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung

Ripto Susilo